

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI SD NEGERI WIROSABAN KOTA YOGYAKARTA

Satrianawati¹, Fitri Indriani
PGSD FKIP Universitas Ahmad Dahlan
satrianawati@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluasi program bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian penyelenggaraan pendidikan inklusi berbasis nilai-nilai pancasila di SD Negeri Wirosaban Kota Yogyakarta. Data diperoleh dengan menggunakan angket. Objek penelitian ini adalah guru dan kepala sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri Wirosaban Yogyakarta dapat dikatakan sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Hal ini dikarenakan penerapan tiga sila pancasila pada aspek input, proses dan output berada pada kategori sangat baik dan baik dengan skor tertinggi. Sebagaimana dapat dilihat pada angket yang diisi oleh kepala sekolah, penerapan sila pertama dari aspek input 81,48% baik, proses 84,62% baik dan output 100% sangat baik. Penerapan sila kedua aspek input 56,82% baik, proses 67,5% baik. Untuk kategori output 100% sangat baik. Penerapan sila kelima kategori input 94% baik, proses 75% baik, output 100% sangat baik. Adapun hasil pengisian angket oleh guru pada penerapan pancasila sila pertama menunjukkan aspek input 74,07% sangat baik, proses 69,23% sangat baik dan output 60% kriteria baik. Penerapan sila kedua kategori input 77,27% sangat baik, proses 77,5% sangat baik, output 100% cukup baik. Penerapan sila kelima dari aspek input 84% baik, proses 70% baik, output 25% baik.

Kata kunci: Pendidikan inklusi dan nilai pancasila

PENDAHULUAN

SD Negeri Wirosaban merupakan salah satu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Sekolah ini telah menyelenggarakan pendidikan inklusi sejak lama, namun resmi diberlakukan sejak 2009 sesuai dengan peraturan permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi. Tujuan diselenggarakannya pendidikan inklusi dalam rangka menerapkan *Education For All* (EFA), di mana semua anak terutama berkebutuhan khusus (ABK) memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, pendidikan yang adil dan bermutu tanpa diskriminasi.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai pancasila terutama sila pertama, sila kedua, dan sila kelima yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam proses penyelenggaraannya, sekolah dituntut memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak sedikit sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi mengalami berbagai kendala termasuk SD Negeri Wirosaban Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah didapatkan informasi bahwa salah satu kendala yang dihadapi adalah belum optimalnya guru pendamping khusus (GPK) dalam membantu anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Hal ini dikarenakan banyaknya sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, sementara jumlah guru pendamping khusus (GPK) sangat terbatas. Sehingga guru pendamping khusus tidak banyak memiliki waktu secara intens membersamai anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di SD Negeri Wirosaban. Saat ini dapat dikatakan bahwa pendampingan siswa berkebutuhan khusus lebih banyak bersama guru kelas, padahal guru kelas memiliki tugas mengurus siswa reguler yang begitu banyak. Hal ini tentu menjadi persoalan mendasar, sekaligus mengindikasikan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri Wirosaban belum sesuai dengan nilai-nilai pancasila.

Namun demikian, hal tersebut perlu pembuktian lebih lanjut melalui penelitian evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai pancasila terutama sila pertama, sila kedua, dan sila kelima yang ditinjau dari tiga aspek yaitu *input*, *proses* dan *output*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kesesuaian penyelenggaraan pendidikan inklusi dengan nilai-nilai pancasila yang dipraktikkan oleh SD Negeri Giwangan Kota Yogyakarta.

Pemahaman lazim pendidikan inklusif, sebagian orang memahaminya dengan pengertian sempit yakni sebagai pendidikan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Pemahaman tersebut

merupakan dampak adanya perluasan proyek pendidikan inklusi di beberapa tahun terakhir yang tersebar di ruang publik. Guru pada umumnya, memahami konsep pendidikan bagi siswa dengan kebutuhan khusus masih bersifat dangkal, yakni sebagai keprihatinan untuk membawa anak-anak cacat ke sekolah.

Berdasarkan Deklarasi Salamanca *inclusive education is understood as a developmental approach aiming to meet the educational needs of all children, youth, and adults emphasizing those who are subjected to marginalization and exclusion. The approach provides equal opportunities for all to reach their maximum potential and achievement* (Spasovski, 2010: 67). Dalam deklarasi Salamanca menjelaskan bahwa pendidikan inklusif dipahami sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi semua anak-anak, pemuda dan orang dewasa yang menekankan orang-orang yang termarginalisasi dan pengecualian. Pendekatan memberikan kesempatan yang sama pada semua untuk mencapai potensi maksimum dan prestasi yang ingin diraih. Pendidikan inklusi menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan individu yang termarginal di lingkungan masyarakat karena kebutuhan khusus yang mereka miliki.

Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Secara umum pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (UU No 20 tahun 2003, Pasal 1 ayat 1). Oleh sebab itu inti dari pendidikan inklusi adalah hak asasi manusia atas pendidikan. Suatu konsekuensi logis dari hak ini adalah semua anak mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang tidak mendiskriminasikan dengan kecacatan, etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan dan lain-lain. Tujuan praktis yang ingin dicapai dalam pendidikan ini meliputi tujuan langsung oleh anak, oleh guru, oleh orang tua, dan oleh masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi harus bisa melayani semua jenis kebutuhan khusus yang dimiliki oleh anak terutama dalam proses pembelajaran. Karena pembelajaran di kelas inklusi pada umumnya memiliki perbedaan dengan kelas yang bukan inklusi, di mana pembelajarannya tidak hanya dilaksanakan secara klasikal, tetapi juga secara individual. Dengan demikian, maka sistem pembelajaran di kelas inklusi memiliki prinsip pembelajaran tersendiri yang berbeda dengan pembelajaran di sekolah biasa. Garnida (2015: 113) menjelaskan terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas inklusi antara lain; (1) menciptakan suasana kelas yang hangat dan ramah serta mau menerima adanya perbedaan; (2) siap mengelolah kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual; (3) pembelajaran yang diselenggarakan dilakukan secara interaktif; (4) mau berkolaborasi dengan pihak terkait (profesi atau sumber daya lain) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi; (5) bersinergi dengan para orang tua dalam melaksanakan proses pendidikan.

Pancasila merupakan lambang negara, yang di dalamnya memiliki lima nilai yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Berkaitan dengan pendidikan inklusi, ada tiga nilai sebagai pendukung dalam pendidikan yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai keadilan.

Nilai ketuhanan pada sila pertama pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa religius yang beriman dan bertakwa dengan menjalankan aturan-aturan yang ada dalam agamanya. Sebagai bangsa yang religius, maka perlu menjunjung toleransi dan rasa saling menghormati antar umat beragama. Hal ini penting, mengingat agama di Indonesia sangat beragam termasuk suku dan budaya. Adapun unsur yang terdapat nilai ketuhanan antara lain; beribadah sesuai dengan agama masing-masing; memupuk toleransi antara umat beragama; menghargai orang lain yang sedang beribadah; tidak memaksakan suatu ajaran agama kepada umat lain; kerja sama antar umat beragama.

Nilai kemanusiaan pada sila kedua pancasila menggambarkan bahwa seluruh rakyat diakui sesuai dengan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Olehnya itu, nilai kemanusiaan perlu dibentuk dalam karakter siswa sejak dini. Lickona (2013: 147) menyatakan bahwa ketika para siswa saling mengetahui seluk beluk temannya masing-masing, guru akan lebih mudah untuk mengembangkan aspek kedua dari komunitas moral, yaitu rasa hormat, saling menguatkan, dan peduli siswa dengan temannya. Dalam hal ini manusia memiliki persamaan derajat serta persamaan hak dan

kewajiban antar sesama manusia. Adapun unsur yang terdapat dalam nilai kemanusiaan antara lain; menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan; tidak membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya; mengembangkan sikap saling mencintai, tenggang rasa, saling menghormati dan bekerja sama, tidak semena-semena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, peduli sosial, berani membela kebenaran dan keadilan.

Nilai keadilan merupakan dasar untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Oleh karena itu perlu diwujudkan dalam kehidupan sosial. Adapun unsur yang terdapat dalam nilai keadilan antara lain; bersikap adil terhadap sesama; memupuk rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan; suka memberi pertolongan pada orang lain tanpa pamrih; suka berkerja keras; menghargai hasil karya orang lain; dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.

Ketiga nilai pancasila tersebut, dalam proses pendidikan inklusi sebagai pendukung baik dari sisi input, proses maupun output. Input berkaitan dengan Visi, misi, tujuan sekolah, guru, GPK, fasilitas, peserta didik, dan sikap kemandirian. Proses berkaitan dengan Implikasi kurikulum, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi belajar. Selanjutnya, *Output* berkaitan dengan prestasi akademik dan non akademik lulusan dan peserta didik yang masih di sekolah, dampak bagi warga sekolah dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluasi dengan menggunakan model CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam yaitu: *context*, *input*, *process*, dan *product*). *Context* merupakan upaya untuk menggambarkan kebutuhan yang tidak terpenuhi populasi dan sampel yang dilayani dan tujuan proyek. Dalam penelitian ini, konteks yang dimaksud adalah melihat kondisi real yang ada di lapangan dan menyusun tujuan untuk penyelenggaraan evaluasi program pendidikan inklusi di sekolah. Konteks juga mencakup banyaknya guru yang menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Konteks memberikan gambaran untuk kondisi nyata di lapangan untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi. Isabella, dkk, (2014: 47) mengklasifikasi evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi antara lain: *input*, proses dan *output*. Adapun untuk *input*, proses dan *output* melanjutkan dari konteks yang ada di lapangan. Input berkaitan dengan Visi, misi, tujuan sekolah, guru, GPK, fasilitas, peserta didik, dan sikap kemandirian. Kedua, proses berkaitan dengan Implikasi kurikulum, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi belajar. Ketiga, *output* berkaitan dengan prestasi akademik dan non akademik lulusan dan peserta didik yang masih di sekolah, dampak bagi warga sekolah dan masyarakat. Jadi, dari model CIPP yang berfokus pada *input*, proses dan *output*. Tujuan digunakannya model CIPP adalah untuk mengukur tingkat kesesuaian sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi dengan nilai-nilai pancasila.

Analisis data bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui angket yang diisi oleh guru dan kepala sekolah yang mengajar di SD Negeri Wirosaban. Adapun data kualitatif diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada guru dan kepala sekolah. Wawancara ini bersifat semi terstruktur dimana peneliti melakukan wawancara tidak berdasar pada konten catatan wawancara yang telah disiapkan namun menggali lebih dalam tentang informasi yang ada di sekolah dasar Negeri Wirosaban Yogyakarta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi disusun berdasarkan butir-butir pancasila pada sila pertama yang dihubungkan dengan *input*, proses, dan *output* dalam sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi. Alat evaluasi ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi berdasar pada ketuhanan yang maha esa; kemanusiaan yang adil dan beradab; dan berdasar pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sila pertama, kedua, dan kelima didesain dengan menyesuaikan butir-butir pada pancasila yaitu, untuk sila pertama dengan beberapa butir yang dijadikan acuan sebagai berikut: (1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. (3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan

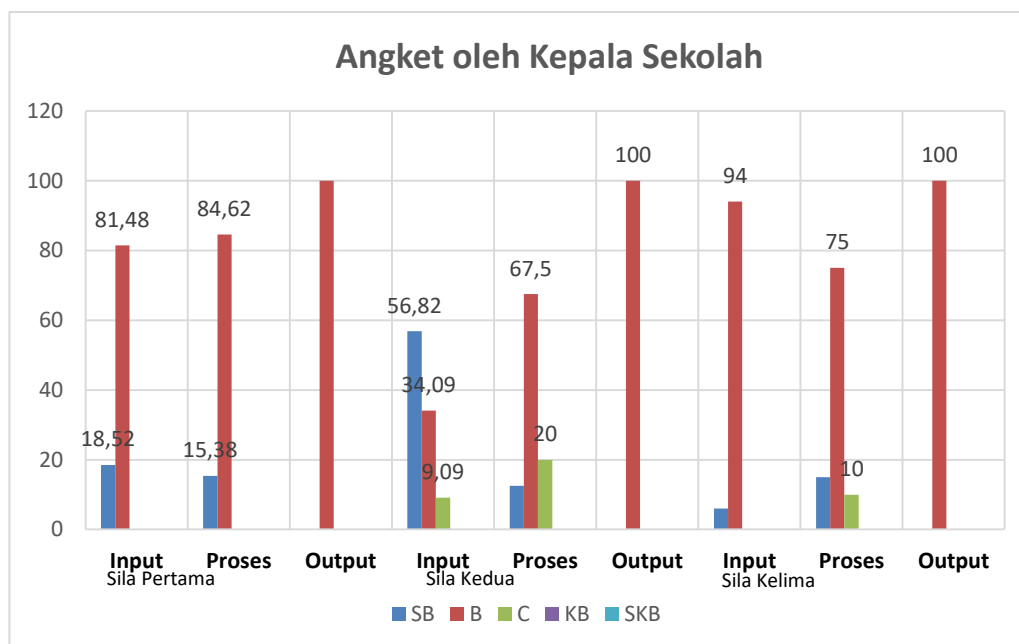
penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. (6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. (7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Selanjutnya untuk sila kedua yaitu: kemanusiaan yang adil dan beradab merujuk pada beberapa butir, yaitu: (1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. (2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. (3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. (4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. (5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. (6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. (7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. (8) Berani membela kebenaran dan keadilan. (9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. (10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan orang lain.

Selanjutnya untuk sila kelima dianalisis menghasilkan beberapa butir yaitu: (1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. (2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. (4) Menghormati hak orang lain. (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. (6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. (7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. (8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. (9) Suka bekerja keras. (10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. (11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

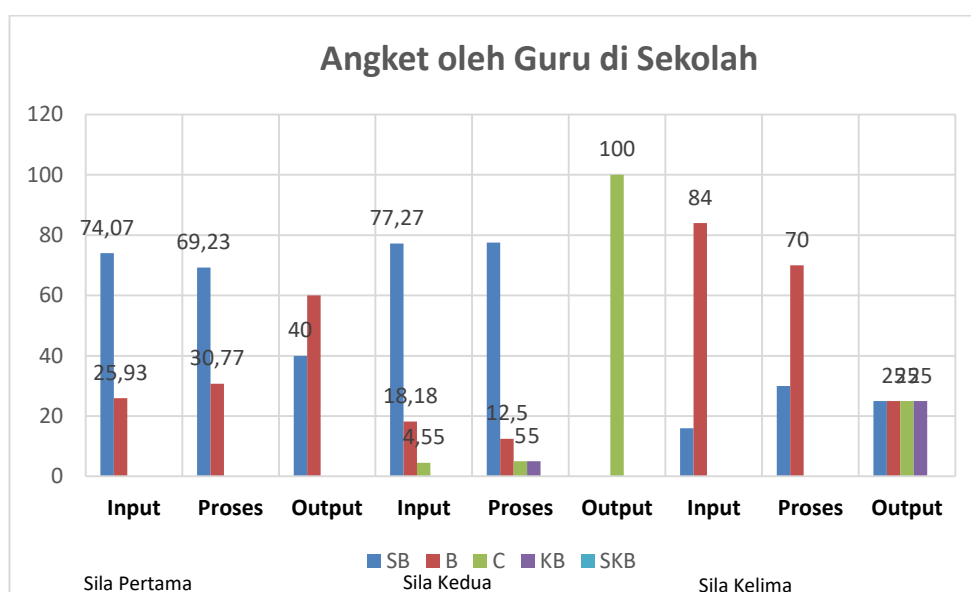
Hasil analisis butir-butir pancasila, kemudian dihubungkan dengan kriteria *input*, proses, dan *output* dalam sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi yang dilihat dari aspek berikut: Pertama, *input* berkaitan dengan Visi, misi, tujuan sekolah, guru, GPK, fasilitas, peserta didik, dan sikap kemandirian. Kedua, proses berkaitan dengan Implikasi kurikulum, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi belajar. Ketiga, *output* berkaitan dengan prestasi akademik dan non akademik lulusan dan peserta didik yang masih di sekolah, dampak bagi warga sekolah dan masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan di SD Negeri Wirosaban Yogyakarta menunjukkan bahwa data diperoleh dengan menggunakan angket yang diisi oleh kepala sekolah untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi berdasarkan nilai-nilai pancasila sila pertama menunjukkan bahwa kategori *input* dengan kriteria sangat baik yaitu 18,52% dan kriteria baik yaitu 81,48%. untuk kategori proses dengan kriteria sangat baik yaitu 15,38% dan sisanya kriteria baik 84,62% dan untuk kategori *output* 100% berada pada kriteria baik. Penerapan sila kedua kategori *input* dengan kriteria sangat baik yaitu 56,82% dan kriteria baik yaitu 34,09%, dan kriteria cukup baik 9,09%. Selanjutnya, untuk kategori proses untuk kriteria sangat baik yaitu 12,5%, kriteria baik yaitu 67,5%, dan kriteria cukup baik yaitu 20% dandan untuk kategori *output* 100% berada pada kriteria baik. Penerapan sila kelima kategori *input* dengan kriteria sangat baik yaitu 6% dan kriteria baik yaitu 94%, dan untuk kategori proses kriteria sangat baik 15%, kriteria baik 75%, kriteria cukup baik 10%, selanjutnya untuk kategori *output* 100% berada pada kriteria baik. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada grafik berikut



Gambar 2. Grafik Pengisian Angket oleh Kepala Sekolah

Adapun hasil pengisian angket oleh guru pada penerapan pancasila sila pertama menunjukkan bahwa kategori *input* dengan kriteria sangat baik yaitu 74,07% dan kriteria baik yaitu 25,93%. untuk kategori *proses* dengan kriteria sangat baik yaitu 69,23% dan sisanya kategori baik 30,77% dan untuk kategori *output* 40% berada pada kriteria sangat baik, dan 60% berada pada kriteria baik. Penerapan sila kedua kategori *input* dengan kriteria sangat baik yaitu 77,27% dan kriteria baik yaitu 18,18%, dan kriteria cukup baik 4,55%. Untuk kategori *proses* dengan kriteria sangat baik yaitu 77,5%, kategori baik 12,5%, kategori cukup baik dan kategori kurang baik masing-masing 5%. untuk kategori *output* 100% berada pada kategori cukup baik. Penerapan sila kelima kategori *input* dengan kriteria sangat baik yaitu 16% dan kriteria baik yaitu 84%, dan untuk kategori *proses* untuk kriteria sangat baik 30% dan kriteria baik yaitu 70%. Selanjutnya untuk kategori *output* 25% berada pada kategori kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada grafik berikut



Gambar 2. Grafik Pengisian Angket oleh Guru di Sekolah

Dari hasil penelitian yang dilakukan di SD Negeri Wirosaban, mesti dilakukan penguatan hubungan antara orang tua dan sekolah terhadap pengelolaan anak. Sekalipun sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusi berbasis nilai-nilai pancasila, namun semua itu harus ada dukungan penuh dari orang tua. Orang tua tidak boleh membiarkan anaknya begitu saja dan menyerahkan sepenuhnya kepada guru. Sebagaimana Jachova, 2004 menjelaskan dari hasil penelitiannya yaitu: (1) *Both parents and the teachers find "the automatic inclusion" unacceptable;* (2) *The teachers have more positive attitudes than parents towards the acceptance of children with special needs in regular schools by their schoolmates;* (3) *Both parents and teachers find the architectonic barriers not overcome;* (4) *Both parents and teachers find the support of the mobile special teachers in the inclusive process necessary;* (5) *The patents' positive attitude towards the inclusion of children with special needs in the regular schools is dominant;* (6) *The engagement of schoolmates' parents in the framework of the inclusive process will enable animation of the local community;* (7) *Both parents and teachers think that the social community does not take enough care of children with special needs;* (8) *The teachers point out the necessity of the special teachers' support with the design of IOP;* (9) *Both parents and teachers accept the realization of the inclusive process.*

Jurnal penelitian ini menjelaskan bahwa baik guru dan orang tua harus bekerjasama dalam mencari hal yang tidak dapat diterima oleh anak. Guru-guru memiliki sikap yang lebih positif dibandingkan dengan orang tua terhadap penerimaan anak-anak kebutuhan khusus di sekolah-sekolah dimana guru tersebut mengajar. Ketika orang tua dan guru menemukan hambatan yang terjadi pada anak, orang tua perlu membantu guru untuk meminimalisir gerakan anak yang berlebihan, khususnya yang tingkah laku anak yang mengganggu orang lain. Olehnya itu, orang tua perlu membantu guru dalam memilihkan guru yang sesuai dengan kebutuhan anak. Memiliki kepastian sikap berupa persetujuan antara guru dan orang tua ketika orang tua memasukkan anak berkebutuhan khusus di sekolah biasa (termasuk sekolah yang gurunya kekurangan guru untuk anak berkebutuhan khusus). Keterlibatan teman orang tua dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusi akan menumbuhkan kesadaran bagi komunitas lokal lainnya. Karena dalam pandangan guru dan orang tua, masyarakat sekitar yang mengetahui adanya anak berkebutuhan khusus tidak peduli terhadap anak berkebutuhan khusus. Guru menunjukkan perlunya dukungan guru khusus dengan desain pendidikan inklusi bagi anak dan orang tua dan guru perlu menerima pelaksanaan proses inklusif.

Jurnal tersebut, sangat sesuai dengan kondisi yang ada di SD Negeri Wirosaban, yang tentunya perlu adanya dukungan orang tua dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusi. Sekalipun sekolah telah menerapkan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi yang berbasis nilai-nilai pancasila, namun tetap perlu memperhatikan keberadaan dan keterlibatan orang tua. Smith (2009: 338) menyatakan bahwa orangtua anak-anak berkebutuhan khusus seringkali menghadapi tantangan-tantangan dan tanggungjawab berbeda dengan yang dialami orangtua lain. Hal ini diperlukan hubungan yang sinergi antara guru dan orang tua dalam pendidikan anak. Hubungan yang baik antara guru dan orang tua akan membantu perkembangan anak disabilitas. Siswa-siswa penyandang disabilitas dapat terpengaruh oleh sotsuasi dan peristiwa tertentu namun kebutuhan belajar dan perilaku mereka membentuk suatu pola kronis (Friend & Bursuck, 2015: 85). Pola kronis bisa terjadi dalam proses pembelajaran yang membentuk perilaku siswa untuk merasa bahwa dirinya merasa terlindungi dari lingkungan di sekitarnya karena merasa bahwa orang tua dan gurunya memiliki hubungan yang baik. Perasaan yang aman dan nyaman dalam pembelajaran tentunya perlu diberikan oleh guru dalam pembelajaran. Di sisi lain yang terjadi di SD Negeri Wirosaban sekolah tidak dapat memberikan pelayanan intensif sesuai dengan kebutuhan khusus anak. Sekalipun penyelenggaraan pendidikan inklusi sudah memenuhi nilai-nilai pancasila, tetapi kurangnya dukungan orang tua tidak memberikan hasil yang maksimal terhadap pendidikan anak.

Di sisi lain, temuan dari penelitian ini adalah kondisi ekonomi keluarga sebagai proses yang dijalani oleh anak dalam kehidupan sehari-hari yang ikut mempengaruhi pelayanan orang tua terhadap kondisi anak, sehingga terkesan anak diserahkan sepenuhnya kepada sekolah tanpa ada tanggung jawab apapun dari orang tua. Dikarenakan orang tua sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga tidak adanya waktu untuk mengurus kebutuhan khusus anak termasuk membiayai *shadow*. Kondisi ekonomi mempengaruhi sikap dan perilaku orang tua terhadap anak. Padahal sikap orang tua terhadap anak mempengaruhi cara mereka memperlakukan anak, dan perlakuan mereka terhadap anak sebaliknya mempengaruhi sikap anak terhadap mereka dan perilaku mereka (Hurlock, 1978: 202).

Olehnya itu, evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi memberikan pesan kepada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi untuk menanamkan nilai kemanusiaan pada anak dalam kehidupan sehari-hari, menanamkan tanggung jawab, sikap saling menghormati dengan orang lain di dalam *input*, proses, dan *output* untuk kemajuan pendidikan Indonesia.

PENUTUP

Evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri Wirosaban Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusi telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terutama sila pertama, kedua, dan sila kelima. Ketiga nilai Pancasila tersebut, dalam proses pendidikan inklusi sebagai pendukung baik dari sisi input, proses, maupun output. Input berkaitan dengan Visi, misi, tujuan sekolah, guru kelas, guru pendamping khusus (GPK), fasilitas, peserta didik, dan sikap kemandirian. Siswa yang diterima di sekolah berasal dari berbagai elemen dengan latar belakang yang berbeda. Dari berbagai aspek input menunjukkan bahwa semua telah sesuai. Adapun dari segi proses yang berkaitan dengan implikasi kurikulum, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi belajar. Dari berbagai aspek proses menunjukkan bahwa semua telah sesuai namun dalam proses pendampingan belum maksimal karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh guru pendamping khusus (GPK). Akibat dari minimnya jumlah GPK yang ada di sekolah inklusi sehingga *output* dari sisi prestasi akademik dan non akademik lulusan belum berdampak bagi warga sekolah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Garnida, Dadang. 2015. *Pengantar Pendidikan Inklusi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hurlock, Elizabeth B. 1978. *Perkembangan Anak: Jilid 2*. Surabaya: Erlangga.
- Isabella, Paramita., Emosda, & Suratno. 2014. *Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SDN 131 /IV Kota Jambi*. Jurnal Tekno-Pedagogi Vol. 4 No. 2. Hal. 45-59. ISSN 2088-205X.
- Jachova, Zora. *Inclusive Education of Children With Special Needs In Republic of Macedoni*. Journal of Special Education and Rehabilitation 2004; 1-2: 35-46. Faculty of Philosophy. Institute of Special Education and Rehabilitation.
- Lickona, Thomas. 2013. *Educating for Character (Bagaimana Sekolah dapat Mengajarkan Sikap Hormat dan Tanggung Jawab)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi.
- Smith, J.David. 2009. *Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua*. Bandung: Nuansa.